

ABSTRAK

Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam mendukung transformasi digital pelayanan administrasi kependudukan. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan efisiensi, kemudahan akses, keamanan data, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan layanan IKD pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Permasalahan penelitian meliputi rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat, keterbatasan kemampuan dalam menggunakan teknologi digital, gangguan jaringan internet, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam melakukan aktivasi IKD. Fokus penelitian meliputi sosialisasi, pelayanan aktivasi IKD, pendampingan masyarakat, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe serta masyarakat pengguna layanan IKD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan layanan IKD telah dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi, pelayanan aktivasi, pendampingan masyarakat, serta pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan pemahaman masyarakat, sosialisasi yang belum merata, kendala jaringan internet dan perangkat pendukung, serta belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan IKD. Kesimpulannya, implementasi kebijakan layanan IKD telah berjalan, tetapi masih memerlukan peningkatan dalam aspek sosialisasi, ketersediaan sumber daya, dan pendampingan masyarakat agar penggunaan IKD dapat lebih luas dan efektif.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Identitas Kependudukan Digital, Pelayanan Publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Lhokseumawe.